

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dapat disimpulkan:

1. Penatausahaan dalam hal pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sudah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021
2. Pembukuan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.
3. Inventarisasi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang sudah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, namun terdapat kendala dalam segi inventarisasi yaitu, minimnya biaya saat melakukan inventarisasi membuat inventarisasi tidak berjalan dengan baik sehingga berdampak pada proses pelaporan aset tetap.
4. Pelaporan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang belum terlaksana dengan optimal dan efektif sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang diharapkan agar setiap pegawai khususnya pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang untuk meningkatkan kepedulian untuk mengurus barang milik daerah atas aset tetap yang berada pada SKPD yang bersangkutan, hal ini berguna agar pegawai saling bekerja sama dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk sama-sama menjaga serta merawat aset tetap milik daerah agar tetap terjaga.
2. Kepada peneliti terdahulu karena penelitian ini sangat kualitatif bisa dipikirkan variable-variabel lain yang memungkinkan atau berpengaruh terhadap pengelolaan untuk diuji secara statistik atau berarah pada penelitian kualitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2012. *Akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah*. Edisi 4. Salemba Empat
- Arifin MHD Habibi. 2010. *"Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)"*.
- As'ad, Moh. 2001. *"Ensiklopedia Manajemen"*. Edisi Kedua, Cet I, Bina Aksara, Jakarta. Rajawali Press. Jakarta.
- Athar, Rima Nazriyati. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau. Jurusan Akuntansi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Darie, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PR Indeks
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui PSAK Nomor 16 (Rumahorbo, 2012; 16.1)
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang *"Pelaksanaan Pengadaan"*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang *"Pedoman Pengelolaan Barang Daerah"*.
- Makagansa, Marcella Daufy Evita. 2015. *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Mulalinda, Veronika. 2014. *Efektifitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sitiro. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Ningsih, Fitri. 2013. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Pada Kantor Camat Pendalihan IV Kota Kabupaten Rokan Hulu. Jurusan Akuntansi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *"Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah"*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *"Pendaftaran Tanah"*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7 *Akuntansi Aset Tetap*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang “*Pengelolaan Aset*”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang “*Kawasan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom*”.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Menteri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang “*Pengelolaan Barang Daerah*”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Tentang “*Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*”. Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri Tahun 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang “*Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 Tentang “*Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah*”
- Rudianto, 2009. *Pengantar akuntansi*, Jakarta, Erlangga
- Siregar Baldric (2015 “*Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual*”
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit. PPM.
- Suryanovi, Sri. 2010. *Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan PUSDIKLAT Kekayaan Negara Dan Perimbangan Keuangan*
- Tandaju, Ivana Penggei. 2015. *Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Siklus Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan asset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado*

Yanis, Irene Sutri. 2015. *Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pada Dinas Pendidikan Kota Manado. Jurusan Akuntansi: Universitas Sam Ratulangi Manado.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “*Pemerintah Daerah*”.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang “*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang “*Perbendaharaan Negara*”.